

HAM dlm UUDS 1950

- Pertama, Hak dasar mengenai kebebasan beragama, keinsyafan batin dan pikiran meliputi kebebasan bertukar atau keyakinan dan sebagainya sebagaimana tertuang pada pasal 18 Konstitusi RIS oleh pasal 18 UUDS 1950
- Kedua, Di dalam pasal 21 UUDS 1950 diatur perihal hak berdemokrasi dan hak mazrak

HAM dlm UUD 1945 Hasil Anlatan danten

Muatan HAM dalam perubahan UUD 1945 merupakan komitmen negara dalam terhadap jaminan, perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia

Pengaturan HAM dalam Konstitusi di Indonesia.

MM HAM dlm Kons. RIS

- Menempatkan HAM pada bagian tersendiri => 27 pasal bab I bagian 5 hak-hak dan kebebasan dasar manusia

Jaminan thdp Hak-Hak Dasar

Jaminan Konstitusi HAM penting artinya bagi arah pemerintahan ketatanegaraan sebuah negara. Sebagai mana ditegaskan oleh Sri Soemantri sebagai berikut:

"Adanya hak-hak dasar itu juga mempunyai arti keseimbangan negara, yaitu keseimbangan antara kekuasaan dalam negara dan hak-hak dasar warga negara."

MM HAM dlm Kons.

L. dikutip dari Sri Soemantri berisi 3 pokok materi muatan:

- 1) Jaminan atas HAM dan warga negara
- 2) Ditetapkannya susunan, warga negaraan suatu negara yang bersifat fundamental
- 3) Adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang bersifat fundamental

Pasal - Pasal Memuat Ketentuan Hak

- * Pasal 27 UUD 1945 (Pekerjaan dan penghidupan yang layak)
- * Pasal 28 UUD 1945 (Kemerdekaan berserikat dan berkumpul)
- * Pasal 29 UUD 1945 (Kemerdekaan memeluk agamanya)
- * Pasal 31 UUD 1945 (Berhak mendapat pengajaran)